



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN JATINEGARA  
**KELURAHAN BALIMESTER**

JL. Jatinegara Barat II / 19 TELP. (021) 8191162 Fax : (021) 8191162  
JAKARTA

Kode Pos 13310

Nomor : 693 / HM. 10.02  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Usulan Daftar Informasi  
Yang Dikecualikan (DIK)

26 Juli 2023

Kepada  
Yth. Plt. Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik  
Selaku  
PPID Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat PPID Provinsi DKI Jakarta nomor 1552/ HM.10.02 tanggal 24 Juli 2023 perihal Penyampaian Usulan Daftar Informasi yang dikecualikan, maka bersama ini saya sampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Kelurahan Balimester Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023 sebagaimana data terlampir.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Kecamatan Jatinegara

Lampiran I : Surat Lurah Kelurahan Balimester  
 Nomor 693 / HM.10.02  
 Tanggal 26 Juli 2023

**DAFTAR USULAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN / RAHASIA  
 KELURAHAN BALIMESTER KECAMATAN JATINEGARA  
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	NAMA / KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI / PENTINGNYA BAGI PUBLIK	
				JIKA DIBUKA	JIKA DITUTUP
1.	Disposisi Surat Pimpinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I	Sesuai dengan isi Surat Dinas	Terbuka apabila ada perintah Pengadilian atau Lembaga Pemerintahan secara tertulis	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait Kebijakan Publik
2.	Nota Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf I	Sesuai dengan isi Surat Dinas	Terbuka apabila ada perintah Pengadilian atau Lembaga Pemerintahan secara tertulis	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait Kebijakan Publik
3.	Dokumen SPJ yang belum diaudit	A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf B B. Putusan MA-RI Nomor 509 K / TUN / 2023	Sampai dengan telah diaudit	31 tahun atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari Pengadilian atau Lembaga Pemerintahan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAK atas kekayaan
4.	Informasi yang belum dikuasai di dokumentasikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6	Sampai dengan informasi dikuasai dan diputuskan informasi arsipnya	Tidak terbatas	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid dan tidak tepat
5.	Data pribadi pegawai Kelurahan Balimester	Mengandung rahasia pribadi	-	Berpotensi mengungkap rahasia pribadi	Data pribadi pegawai Kelurahan Balimester



**MATRIKS UJI KONSEKUENSI**

Informasi yang Diuji :

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf angka 1 UU KIP (menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana)	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut pasal 17 Huruf a angka 2 UU KIP (mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana)	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 3 UU KIP (mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional)	YA/TIDAK	
4	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 4 UU KIP (membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan atau keluarganya)	YA/TIDAK	
5	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf a angka 5 UU KIP (membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan atau prasarana penegak hukum)	YA/TIDAK	
6	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf b UU KIP (Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat)	YA/TIDAK	
7	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 1 UU KIP (informasi tentang strategi, operasi, taktik dan teknik yang diberikan dengan penyelenggaraan penilaian sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri)	YA/TIDAK	
8	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 2 UU KIP (dokumen yang memuat tentang strategi, intelegen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi)	YA/TIDAK	
9	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 3 UU KIP (jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan)	YA/TIDAK	
10	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 4 UU KIP (gambar dan dat tentang situasi dan keadaan pengakhiran dan/atau instansi militer)	YA/TIDAK	

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
11	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 5 UU KIP (data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia)	YA/TIDAK	
12	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 6 UU KIP (sistem persandia Negara)	YA/TIDAK	
13	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf c angka 7 UU KIP (sistem intelejen Negara)	YA/TIDAK	
14	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf d UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia)	YA/TIDAK	
15	Apakah informasi yang diungkapkan dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP (rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara)	YA/TIDAK	
16	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 2 UU KIP (rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, model operasi institusi keuangan)	YA/TIDAK	
17	Apakah Informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 3 UU KIP (rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya)	YA/TIDAK	
18	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 4 UU KIP (rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti)	YA/TIDAK	
19	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 5 UU KIP (rencana awal investasi asing)	YA/TIDAK	
20	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 6 UU KIP (proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya)	YA/TIDAK	
21	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf e angka 7 UU KIP (hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang)	YA/TIDAK	
22	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 1 UU KIP (posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional)	YA/TIDAK	

NO.	A. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
23	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 2 UU KIP (korespondensi diplomatik antar negara)	YA/TIDAK	
24	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 3 UU KIP (sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional)	YA/TIDAK	
25	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf f angka 4 UU KIP (perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri)	YA/TIDAK	
26	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf 9 UU KIP (informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang)	YA/TIDAK	
27	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 1 UU KIP (riwayat dan kondisi anggota keluarga)	YA/TIDAK	
28	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 h angka 3 UU KIP (riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang)	YA/TIDAK	
29	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 h angka 3 UU KIP (kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang)	YA/TIDAK	
30	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 4 UU KIP (hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapanilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang)	YA/TIDAK	
31	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf h angka 5 UU KIP (catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal)	YA/TIDAK	
32	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 17 huruf l UU KIP (momerandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas pemutusan Komisi Informasi atau Pengadilan)	YA/TIDAK	
	Jika ada satu atau lebih jawaban ya, maka tidak perlu untuk melanjutkan uji konsekuensi. Dengan demikian informasi dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan (TIDAK dapat dipublikasikan kepada publik)	YA/TIDAK	

Jika semua jawaban adalah Tidak, maka  
Dilanjutkan dengan mengisi bagian B

NO.	B. INDIKATOR MUTLAK	*PENILAIAN	PERTIMBANGAN
1	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf d UU KIP (informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan)	YA/TIDAK	
2	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut Pasal 6 ayat (3) huruf e UU KIP (informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan)	YA/TIDAK	
3	Apakah informasi yang diungkapkan merupakan informasi yang tidak dapat dipublikasikan menurut UU lainnya, menurut Pasal 17 huruf j UU KIP. Jika ya, sebutkan	YA/TIDAK	

\* (Diisi oleh PPID)

